



# Buletin Parlementaria

Nomor 1110/V/VI/2020 • Juni 2020

## DPR Akan Evaluasi Penyaluran Bansos Covid-19



6 Komisi I Dukung  
Diplomasi RI Pastikan  
Akses Vaksin Covid-19



12 Komisi V Apresiasi  
Program Padat Karya  
Kementerian PUPR



9 772614 339005



# DPR Akan Evaluasi Penyaluran Bansos Covid-19

**K**etua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyatakan DPR RI dan Pemerintah akan bersinergi dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai kepada warga terdampak pandemi virus Corona (Covid-19). Menurut Puan, beberapa hasil temuan di lapangan akan disampaikan kepada Pemerintah, sehingga dapat segera dievaluasi pada program-program bansos dari Pemerintah ke depannya.

“Kunjungan ini dalam rangka pengawasan dari DPR RI atas bantuan sosial non tunai yang diberikan Pemerintah selama 3 bulan ini, bagaimana mekanismenya dan siapa saja yang menerima, apakah penerima itu betul-betul merasakan manfaatnya? Dipergunakan untuk apa?” kata Puan ketika menghadiri penyerahan bansos di Desa Jayanti, Kecamatan Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (23/6). Turut hadir Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial Juliar P. Batubara.

Bansos tunai ini diberikan kepada 1.178 warga Desa Cikande. Bansos yang diberikan berupa bantuan langsung tunai (per KK) sebesar Rp 600.000. Politisi PDI-Perjuangan itu menekankan agar bantuan Pemerintah itu diprioritaskan kepada masyarakat yang tidak mampu, sehingga mereka tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa pandemi Covid-19.

“Karena memang ini adalah anggaran untuk mengatasi pemulihan dalam proses pandemi Covid sampai nanti bulan Desember. Tiga bulan sudah berjalan, tiga bulan selanjutnya tentu nanti kita evaluasi juga terkait dengan program-program bantuan Pemerintah ini,” tegas Puan sembari



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Juliar P. Batubara berdialog dengan warga penerima bansos di Desa Jayanti, Kecamatan Cikande, Tangerang. Foto: Eot/MAN

menyoroti mekanisme serta penentuan waktu pemberian bantuan. Ia menilai, seharusnya ada penentuan tanggal pemberian bantuan di tiap-tiap wilayah.

“Ini menjadi salah satu evaluasi yang nanti saya sampaikan kepada Pemerintah. Supaya untuk mengurangi penumpukan dan antrean yang katanya bisa sampai 3 jam untuk pencairan bantuan tunainya,” ungkap Puan. Menurut Puan, seharusnya pemberian bansos itu bisa ditentukan tanggalnya. Sehingga masyarakat bisa tahu kapan harus datang ke tempat pembagian bansos tepat waktu. Penentuan tanggal juga dapat mengurangi penumpukan orang saat bansos itu dibagikan, sehingga potensi penularan virus Covid-19 bisa diminimalisasi.

Hal itu dikatakan Menko PMK periode 2014-2019 itu ketika berdialog dengan salah seorang penerima bantuan sosial dari Pemerintah di Desa Cikande itu. “Terkait tanggal ini penting sekali, agar mereka itu datang bisa

tepat tanggal. Saya bertanya tanggal berapa biasanya dapat (bansos) Bu? Dia *enggak* ingat, artinya tanggalnya itu tidak diputuskan,” jelas legislator dari Jawa Tengah V itu. Selanjutnya, masalah lain yang menjadi sorotan Puan adalah persoalan perbaikan data penerima bantuan.

Dirinya berharap segera ada perbaikan dan sinkronisasi data. “Kalau masih ada masalah-masalah yang kita bisa memahami karena memang pandemi Covid ini bukan hanya melanda Indonesia, tapi hampir seluruh dunia mengalami hal seperti ini. Banyak hal yang harus dilakukan secara cepat untuk tetap bisa menjaga kesehatan dan tentu saja memulihkan ekonomi,” terangnya.

Puan menambahkan, evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah, sehingga dapat segera dievaluasi dalam program bansos berikutnya, khususnya pembagian bansos di bulan Juli-September 2020 bisa berjalan lebih baik. ■ ann/sf

# Haji Terbatas, Keselamatan Jemaah Lebih Penting

**P**emerintah Arab Saudi memutuskan tetap menyelenggarakan ibadah Haji 2020 dengan jemaah terbatas dan hanya diperuntukkan bagi calon jemaah Haji yang sudah berada di negara tersebut. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mengaku menghormati keputusan itu. Menurutnya, keselamatan jemaah sangat penting di tengah pandemi Covid-19.

“Kita hormati keputusan Arab Saudi itu karena memang dalam situasi di tengah pandemi Covid-19 ini. Memang keselamatan para jemaah itu yang paling penting,” kata Dasco saat ditemui awak media di selasar Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6). Dasco menilai, keputusan Pemerintah Arab Saudi itu sejalan dengan langkah Pemerintah Indonesia yang memilih tidak mengirimkan jemaah Haji pada tahun ini.

“Kemudian memang sejalan dengan langkah Pemerintah Indonesia yang tidak mengirimkan jemaah Haji itu sudah sejalan, karena memang ada gejala-gejala awal bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak menerima jemaah dari

banyak negara, termasuk Indonesia,” ujar Dasco sembari menambahkan, gejala itu terlihat ketika Kementerian Agama RI tidak bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait penginapan dan catering.

Politisi Partai Gerindra ini memandang langkah Pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jemaah calon Haji sudah sangat tepat, sehingga masyarakat tak perlu menunggu kepastian dari Pemerintah Arab Saudi. “Apa jadinya kalau kita siap-siap sudah berangkat, sudah disiapkan, tiba-tiba Pemerintah Arab Saudi seperti sekarang memang tidak memberikan kuota kepada banyak negara,” tutur legislator dapil Banten III itu.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyatakan musim Haji 1441 Hijriah diputuskan akan tetap berlangsung dengan jumlah jemaah yang terbatas. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dalam Saudi Press Agency, Senin (22/6) merilis, setiap orang yang saat ini tinggal di Arab Saudi, dari negara manapun mereka berasal, diperbolehkan menunaikan ibadah Haji tahun ini. ■ sf



Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Eno/MAN



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Medsos dan Website)

**REDAKTUR**

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**

M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

**ANGGOTA REDAKSI**

Rizka Arinindy, S.Sos. Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P. S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indrianti, Mohammad Rizki Nugraha.

**FOTOGRAFER**

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie.

**ANALIS MEDIA**

Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyawati

**INFOGRAFIS**

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Fajar Suryanto

**ADMINISTRASI**

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**

Sartomo, S.S., M.Si (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

**STAF PRODUKSI**

Subadri, S.E. Barliansyah, Fathurahman

**DESAIN GRAFIS**

Dito Sugito

**PHOTOGRAFER ART**

Friederick Munchen

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Siti Nur Aldah S.A.P., M.AP, Sugiyanto, S.E., Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



# Perlu Langkah Konkret Penuhi Kebutuhan Energi Indonesia

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel menilai perlu langkah konkret dari Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan energi, khususnya di daerah-daerah yang sulit terjangkau. Hal ini dikatakannya saat berdialog dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

“Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia belakangan ini adalah belum meratanya pemenuhan energi di beberapa wilayah, karena faktor geografis, atau di daerah-daerah yang sulit terjangkau. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari Pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan energi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia di wilayah yang sulit terjangkau,” ujar Gobel.

Ia melanjutkan, sejatinya saat ini layanan energi listrik tidak hanya berfungsi untuk penerangan semata. Namun lebih dari itu, energi listrik secara tidak langsung juga bisa menggerakkan potensi ekonomi keluarga, bahkan potensi ekonomi suatu daerah juga. Terlebih lagi bagi daerah yang termasuk daerah terluar dan tertinggal di wilayah Indonesia.

“Pasokan energi listrik cukup, masyarakat produktif dan potensi ekonomi keluarga meningkat, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pun ikut meningkat. Sehingga pendapatan daerah pun ikut bertambah,” pungkas politisi Fraksi Partai NasDem ini

”

**SALAH SATU PERMASALAHAN YANG DIHADAPI INDONESIA BELAKANGAN INI ADALAH BELUM MERATANYA PEMENUHAN ENERGI DI BEBERAPA WILAYAH, KARENA FAKTOR GEOGRAFIS, ATAU DI DAERAH-DAERAH YANG SULIT TERJANGKAU**

Sebagaimana diketahui, dalam periode sebelumnya Pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35 ribu Megawatt (MW) dalam jangka waktu 5 tahun (2014-2019). Sementara dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) PT PLN (Persero) 2019-2028, penambahan infrastruktur ketenagalistrikan yang direncanakan dibangun sampai dengan tahun 2028 adalah: pembangkit tenaga listrik sebesar 56.395 MW, jaringan transmisi sepanjang 57.293 kms, gardu induk sebesar 124.341 MVA, jaringan distribusi sepanjang 472.795 kms, dan gardu distribusi sebesar 33.730 MVA. ■ ayu/es



Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel saat berdialog dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif Foto: Rifqi/MAN



# Pimpinan DPR Terima Rekomendasi Penolakan RUU HIP



Pimpinan DPR RI menerima rekomendasi penolakan pembahasan RUU HIP. Foto: Rifqi, Mario/MAN

**P**impinan DPR RI yang terdiri dari para Wakil Ketua DPR RI Korpolkam M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rahmat Gobel menerima rekomendasi penolakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari perwakilan Demonstrasi Aliansi Nasional Anti Komunisme yang melakukan aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Kita telah menerima (rekomendasi) dari Aliansi Nasional Anti Komunis dan telah melakukan diskusi panjang mengenai masukan

masukan dari para habaib, tuan guru dan masyarakat. Tentunya masukan mengenai penolakan RUU HIP ini kami tampung dan kami berkomitmen melakukan penyetapan, tentunya dengan aturan dan mekanisme yang ada,” kata Azis usai audiensi di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa mekanisme penyetapan RUU HIP itu akan dilakukan dengan mengikuti tata tertib dan sesuai aturan di dalam Undang Undang. Untuk itu, Azis berterima kasih kepada perwakilan Aliansi Nasional Anti Komunisme dan masyarakat yang selalu konsen terhadap kinerja DPR RI.

“Kita akan melihat kembali, mudah-mudahan ini masukan yang berkaitan dengan pasal pasal kontroversial dalam RUU HIP. Teman teman habaib dan tuan guru serta tokoh masyarakat menyampaikan pasal kontroversial yang berkaitan dengan pasal 5 ayat 1 dan pasal 7 mengenai trisila dan ekasila, tentunya akan menjadi catatan dan dijadikan *underline* untuk kita berkomitmen. Insha Allah akan kita setop,” yakin Azis kepada awak media.

Azis menambahkan, posisi RUU HIP saat ini berada di Pemerintah. Sebelumnya Pemerintah melalui Menkopolkum Mahfud MD telah mengambil sikap melakukan penghentian RUU HIP. “Tentunya atas usulan Pemerintah tersebut, akan menjadi mekanisme pembahasan yang ada di DPR sesuai tata tertib. Nantinya DPR melalui mekanisme Rapat Pimpinan kemudian Rapat Badan Musyawarah dan dibawa ke Paripurna untuk melakukan komitmen penyetapan RUU HIP,” komitmen legislator daerah pemilihan Lampung II itu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak bersyukur Pimpinan DPR RI merespons tuntutan pihaknya dengan berjanji untuk menghentikan RUU HIP. Pihaknya meminta agar DPR RI dan Pemerintah tidak saling melempar tanggung jawab terkait mekanisme penghentian pembahasan RUU HIP. Perwakilan yang diterima Pimpinan DPR RI ini mewakili rombongan demonstran antara lain Front Pembela Islam (FPI), PA 212, GNPF Ulama, serta ormas lainnya. ■ sf

# Komisi I Dukung Diplomasi RI Pastikan Akses Vaksin Covid-19

**K**omisi I DPR RI mendukung upaya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam menjalankan diplomasi Indonesia untuk terus menyuarakan pentingnya aksesibilitas terhadap obat-obatan dan vaksin Covid-19 dengan harga terjangkau bagi semua negara, termasuk negara berkembang dan negara terbelakang. Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Natakusumah mengatakan Indonesia perlu meningkatkan kerja sama dan kemitraan strategis di regional maupun multilateral, terutama di masa pandemi virus Covid-19.

“Kami mendorong Pemerintah meningkatkan kerja sama terkait dengan pertukaran informasi secara internasional dan menunjang penelitian di dalam negeri kita terkait penanganan Covid-19,” kata Rizki dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (23/6). Rizki menuturkan vaksin Covid-19 akan menjadi peluang bisnis negara-negara maju. Kendati masih berproses, bahkan sejumlah negara mengklaim telah mengamankan pasokan vaksin bagi warganya.

Karenanya, politisi Partai Demokrat itu mendorong Kemlu untuk terus berupaya memfasilitasi produksi obat-obatan Covid-19 dalam negeri serta pengembangan vaksin secara mandiri. Ia menambahkan, bagaimana penanganan Covid-19 di dalam negeri akan berimplikasi terhadap peranan Kemenlu untuk optimalisasi diplomasi RI untuk pemulihan ekonomi ke depan.

“Ini juga merupakan isu sangat sensitif karena terkait Covid -19, dalam *fit and proper test* Dubes kemarin kita mempertanyakan bagaimana menjaga citra kita di dunia internasional dalam masa pandemi Covid-19 dan secara rasional, mereka sampaikan bahwa citra



Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Natakusumah. Foto: Oji/MAN

bangsa kita di luar tergantung dengan apa yang kita lakukan dalam negeri,” jelas politisi dapil Banten I itu.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sejak awal pandemi, diplomasi Indonesia fokus untuk memastikan ketersediaan peralatan medis dan obat-obatan serta akses ke vaksin. “Kemlu juga memfasilitasi pemenuhan kebutuhan obat-obatan dalam negeri untuk penanganan Covid-19, termasuk melalui pembelian obat jadi secara *business to business*, dukungan hibah obat serta fasilitasi pembelian bahan baku obat,” ungkap Retno kepada Komisi I DPR RI.

Retno menambahkan, hingga saat ini Indonesia secara konsisten bekerja untuk menyuarakan *accessibility* dan *affordability of vaccine*, dalam berbagai forum multilateral. Retno menyebut, vaksin akan menjadi *game changer* oleh karena itu prinsip-prinsip soal akses dan terjangkaunya harga vaksin harus terus didengungkan untuk mendapatkan dukungan yang luas.

Kemlu juga mendukung penanganan Covid-19 melalui kolaborasi dan kerja sama internasional. Salah satunya, Indonesia berpartisipasi dalam Global Solidarity Trial yang menguji cobakan beberapa jenis obat-obatan untuk menangani Covid-19. Menurutnya, 22 rumah sakit di Indonesia yang tergabung dalam uji coba tersebut.

Mengenai pengembangan vaksin, lanjut Retno, Indonesia mengambil 2 langkah strategi, yakni pengembangan vaksin nasional melalui konsorsium nasional Kementerian dan Lembaga, lembaga riset dan BUMN. Selanjutnya, Retno memastikan, pengembangan vaksin melalui kerja sama internasional antara perusahaan farmasi nasional dengan mitra di luar negeri.

Komisi I DPR RI juga mendorong Kemlu untuk mengevaluasi kontribusi keanggotaan Indonesia di Organisasi Internasional (OI) terutama untuk mendukung agenda prioritas diplomasi RI ke depan, yakni *health security* dan pemulihan ekonomi. ■ ann/sf



# Akses Internet Meningkatkan, Kominfo Diminta Tingkatkan Infrastruktur Telekomunikasi

**A**nggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai kebutuhan akses internet masyarakat meningkat pesat di era *new normal* atau tatanan baru. Karena itu, Pemerintah dalam ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diminta untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, khususnya di daerah terpencil. Disampaikan Yan, di masa pandemi Covid-19 ini banyak aktivitas masyarakat dilakukan secara daring atau *online* karena adanya pembatasan jarak, termasuk bekerja dari rumah, serta proses kuliah dan belajar.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan terus berlanjut di era *new normal*. Sayangnya, sebagian wilayah di Indonesia masih kesulitan mendapatkan akses internet yang memadai. “Kita tahu, yang paling dibutuhkan di masa seperti saat ini adalah akses internet. Namun kita ketahui banyak di wilayah Indonesia mengalami kendala untuk mendapatkan akses internet,” ungkap Yan dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo, KPI dan Dewan Pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

Yan mencontohkan, di wilayah Papua dari 28 kabupaten dan kota, menurutnya, hanya 5 kabupaten yang bisa menjalankan sistem pembelajaran *online*. “Saya yakin, hal ini tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan. Karena itu, kami berharap ada terobosan dari Pak Menteri (Menkominfo), bahwa digitalisasi butuh peningkatan infrastruktur telekomunikasi, sehingga akses internet untuk belajar *online* dan kepentingan lainnya, bisa diakses seluruh masyarakat,” terang

politisi Partai Gerindra itu.

Dia menambahkan, Komisi I DPR RI mendukung peningkatan kebutuhan tambahan anggaran Kominfo Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 16,8 triliun dari total kebutuhan anggaran Kominfo sebesar Rp 22,5 triliun. Penambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk percepatan digitalisasi nasional. Di antaranya, percepatan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T, fasilitas percepatan penggelaran infrastruktur oleh operator komunikasi di wilayah 3T, digitalisasi penyiaran, dukungan layanan pos logistik serta pengembangan ekonomi digital.

Selain itu, ia mengingatkan agar Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur telekomunikasi sehingga target Indonesia merdeka sinyal bisa terealisasi dengan baik. “Akses internet melalui 4G, kita ketahui masih ada 15 ribu desa atau

kelurahan yang belum mendapatkan akses. Kami berharap bukan saja sekedar data yang disajikan Pak Menteri (Kominfo), tetapi harus terus melakukan evaluasi. Jadi jangan selalu fokus dengan pengadaan akses, sehingga target Indonesia merdeka sinyal bisa benar-benar terealisasi 5 sampai 10 tahun ke depan,” pungkash legislator daerah pemilihan Papua itu.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Lodewijk F. Paulus mengatakan saat ini pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni sekaligus aman sangat diperlukan. Karenanya, politisi Partai Golkar itu mendorong agar Pemerintah membangun infrastruktur telekomunikasi digital yang aman. “Kita butuh infrastruktur teknologi komunikasi misalnya pengadaan sendiri satelit. Bagaimana kita bisa terlibat dalam digitalisasi, namun harus aman,” pesan legislator dapil Lampung I itu. ■ ann/sf



Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas. Foto: Ojji/MAN

# PKPU dan Perbawaslu Harus Jamin Keselamatan Semua Pihak dalam Pilkada

**W**akil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Bawaslu yang sedang dibahas bersama Komisi II DPR RI harus bisa memastikan dan memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Demikian diungkapkan Saan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, serta Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6). Rapat tersebut membahas Rancangan PKPU tentang pemilihan dalam kondisi bencana non alam Covid-19, Peraturan Bawaslu tentang penyelenggaraan pengawasan, penanganan laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota lanjutan dalam kondisi bencana non-alam.

“Kita pastikan bahwa PKPU dan Peraturan Bawaslu terkait pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi ini bisa memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Karena memang ini adalah pertama kali kita melakukan Pilkada di tengah bencana non-alam, yaitu Covid-19,” ucap Saan.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyatakan, peraturan KPU yang dahulu sudah ditetapkan bersama tersebut harus disesuaikan kembali dengan kondisi pandemi Covid-19, yakni memberikan kepastian dan jaminan keselamatan dan

kesehatan baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih.

Dalam kesempatan tersebut, Saan meminta agar Anggota Komisi II DPR RI bisa mencermati secara detail Rancangan PKPU dan Perbawaslu itu, bagian mana saja yang belum tercantum untuk memastikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta, dan pemilih. “Kita juga ingin memastikan bahwa Rancangan PKPU dan Peraturan Bawaslu ditengah kondisi pandemi Covid-19 ini tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat,” ujar Saan.

Selain itu, tambahunya, kualitas dari Pilkada itu sendiri juga tidak akan berkurang walaupun itu dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Oleh karenanya PKPU ini harus bisa memastikan bahwa kualitas Pilkada dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi ini bisa tetap terjamin

“Jangan sampai ketika Pilkada dilakukan di tengah pandemi, tahapan-tahapannya mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Ini adalah hal-hal yang penting agar keraguan dan kekhawatiran di masyarakat bisa kita jawab. Dan (diharapkan) melalui PKPU dan Perbawaslu ini, kepercayaan terhadap Pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang itu bisa mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari publik,” tandas legislator dapil Jawa Barat VII itu.

Dalam rapat tersebut, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan prosedur tambahan protokol kesehatan. “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota akan melakukan prosedur tambahan yang mengatur mengenai, kegiatan bertatap muka secara langsung atau yang menimbulkan kontak fisik secara langsung,” terang Arief. ■ dep/es



Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI berdiskusi dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Kemendagri. Foto: Runi/MAN



# Segera Cairkan Anggaran Tambahan Pilkada 2020 untuk Protokol Kesehatan



Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Foto: Runi/MAN

**T**ahapan awal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sudah dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 lalu, namun hingga saat ini anggaran tambahan untuk mendukung pelaksanaan standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam tahapan Pilkada tersebut belum juga digelontorkan, meskipun telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegaskan, sampai detik ini belum masuk laporan terkait dana untuk penyelenggaraan standar protokol kesehatan Covid-19 bagi

pelaksanaan tahapan awal Pilkada 2020 tersebut.

“Bagaimana Komunikasi Mendagri dengan Menteri Keuangan. Ini mesti jelas. Pemerintah, dalam hal ini Mendagri mengatakan (Pilkada dilaksanakan) tanggal 9 Desember 2020, dan kita siap. Jangan sampai penyelenggara terpapar, tahapan menjadi terkapar,” tandas Junimart saat RDP dengan Kemendagri, BNPP, dan DKPP di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Kalau penyelenggara terpapar Covid-19, sambung Junimart, maka penyelenggaraan Pilkada Serentak akan terganggu pelaksanaannya. Oleh karenanya ia mendesak agar dana anggaran untuk Pilkada

Serentak 2020 itu bisa segera direalisasikan oleh Pemerintah.

“Jadi tolong, untuk anggaran Pilkada ini (bisa) gelontorkan sesegera mungkin. Kalau memang Mendagri ada kendala dengan Kementerian Keuangan, tentu kami dari Komisi II DPR RI juga bisa bersikap. Jadi bangunlah (juga) komunikasi dengan Komisi II supaya semua transparan dan berjalan secara mantap,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Dalam kesempatan itu, Junimart juga meminta Mendagri melakukan pengawasan terhadap Dana Desa, terkait adanya penyaluran perubahan tentang Dana Desa tersebut. “Ini tolong disampaikan kepada aparat pemerintahan. Masih banyak kepala desa yang tidak paham mau dikemanakan Dana Desa ini. Padahal sesungguhnya Dana Desa itu untuk membangun ketahanan ekonomi desa. Tetapi mereka sering ditekan oleh kepala daerah,” ucap Junimart.

Sementara itu, menyangkut masalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Junimart mengaku banyak menerima surat terkait masalah IPDN. “Alangkah tragisnya, ketika para Praja itu, yang calon-calon pemimpin di pemerintahan ini diajarkan secara tidak langsung untuk tidak tertib. Contoh, pada acara tanggal 24 Mei 2020, banyak yang (hadir) tidak menggunakan masker, yang menurut saya sudah melanggar Pergub Jabar nomor 36/2020. Tolong hal ini diawasi,” tegas legislator dapil Sumut III itu. ■ dep/es

# BNPT Diharap Utamakan Pencegahan Terorisme

**A**nggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengharapkan agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengutamakan pencegahan aksi terorisme. Pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

“BNPT harus lebih fokus pada pencegahan, ini yang kita butuhkan,” tandas Cucun di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6). Ia menegaskan agar BNPT fokus pada pencegahan terorisme, adapun penindakan aksi terorisme yang sudah terjadi, BNPT harus mampu mengkoordinir beberapa lembaga negara seperti Kepolisian.

Politisi Fraksi PKB ini berharap kepada Kepala BNPT yang baru Boy Rafli Amar, agar membuat strategi dan menyusun program untuk pencegahan terorisme. Dengan program dan strategi yang terarah dan jelas, maka Komisi III DPR RI akan memberikan dukungan anggaran untuk BNPT.

”

**AGAR BNPT FOKUS PADA PENCEGAHAN TERORISME, ADAPUN PENINDAKAN AKSI TERORISME YANG SUDAH TERJADI, BNPT HARUS MAMPU MENKOORDINIR BEBERAPA LEMBAGA NEGARA SEPERTI KEPOLISIAN**

“Saya harapkan ini lebih baik lagi. Langkah-langkah pencegahan bisa dilakukan BNPT. Komisi III *men-support* anggaran pencegahan untuk BNPT,” ujar Cucun.

Dia juga menjabarkan soal pentingnya deradikalisasi, Cucun pun mempertanyakan apa langkah deradikalisasi yang akan dilakukan BNPT selanjutnya. “Deradikalisasi juga penting. Seperti apa langkah-langkah yang dilakukan kepala BNPT,” tanya Cucun.

Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Pelaksanaan deradikalisasi dikoordinasikan oleh BNPT, dalam pelaksanaan deradikalisasi, BNPT bisa melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. ■ eko/es

Anggota Komisi III DPR RI  
Cucun Ahmad Syamsurijal.  
Foto: Andri/MAN





# Kementan Dinilai Wujudkan Ketahanan Pangan Meski Anggaran Dipotong

**K**ementerian Pertanian (Kementan) dinilai sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI sudah cukup baik dalam menghasilkan ketahanan pangan selama 3 bulan Indonesia menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19) ini. Pasalnya selama pandemi melanda Tanah Air, sejumlah kebutuhan pangan mudah diperoleh masyarakat di setiap pasar.

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari menuturkan, secara umum Kementan sudah berusaha maksimal menjaga produksi pertanian, meski mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar. Namun, ia memberikan masukan terkait perlunya *political will* yang kuat untuk mendorong kedaulatan pangan ini di tengah ketidakpastian kapan wabah Covid-19 ini akan berakhir.

“Sedikit memberikan masukan, diperlukan *grand strategy* untuk *political will* yang kuat sehingga mendorong kedaulatan pangan ini. Litbang (Penelitian dan Pengembangan) dan SDM pertanian juga sangat penting dengan bioteknologi yang dihasilkan, meskipun dalam kondisi anggaran kurang,” ungkap Endang saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Senin (23/6).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19 ini tak lepas dari tingginya serapan anggaran di tahun 2019 lalu. Adapun Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam kesempatan Raker ini mengungkapkan bahwa realisasi



Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari. Foto: Runi/MAN

”

**SECARA UMUM  
KEMANTAN  
SUDAH BERUSAHA  
MAKSIMAL  
MENJAGA PRODUKSI  
PERTANIAN, MESKI  
MENGALAMI  
PEMOTONGAN  
ANGGARAN YANG  
CUKUP BESAR**

anggaran dari Bulan Januari hingga akhir Desember 2019 sebesar Rp 19,42 triliun atau 88,97 persen dari pagu sebesar Rp 21,83 triliun. Ia menyebut realisasi anggaran tertinggi di Badan Karantina Pertanian yang mencapai 99,18 persen.

Kemudian diikuti Sekretariat Jenderal Kementan sebesar 98,37 persen dan Badan Ketahanan Pangan mencapai 97,05 persen. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa kinerja pengembangan komoditas pangan khusus padi cukup bagus. Hal itu juga tercermin dari jumlah produksi padi yang hingga akhir Desember 2019 sebesar 54,6 juta ton GKG (gabah kering giling), atau setara 31,31 juta ton beras dan ada surplus sebesar 1,53 juta ton. ■ hs/sf

# Komisi V Apresiasi Program Padat Karya Kementerian PUPR

**A**nggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi program padat karya yang telah dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurutnya program padat karya Kementerian PUPR tersebut sangat bermanfaat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas, terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6), Novita berharap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), kemudian Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dapat terus ditingkatkan ke depannya.

“Saya mengapresiasi Menteri PUPR dan jajaran atas program-program yang sudah turun, khususnya padat karya. Karena, sangat bermanfaat untuk masyarakat apalagi di tengah pandemi Covid-19.

”

**PROGRAM PADAT KARYA KEMENTERIAN PUPR TERSEBUT SANGAT BERMANFAAT DIRASAKAN SECARA LANGSUNG OLEH MASYARAKAT LUAS, TERLEBIH DI MASA PANDEMI COVID-19 SAAT INI**

Jadi harapannya, seperti program BSPS, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, P3TGAI dan KOTAKU itu ditingkatkan. Jadi, kalau ada program jalan atau embung yang tidak terlalu prioritas mohon bisa dialihkan kepada program-program yang langsung padat karya,” ujarnya saat menyampaikan pendapat.

Di sisi lain, politisi Fraksi Partai Gerindra ini mempertanyakan kepada Menteri PUPR mengenai *progress* program pembangunan tol akses menuju wilayah Cilacap. “Itu *progress*-nya bagaimana? Saya ingin mengetahui pembangunan tol menuju Cilacap, sudah sampai mana perkembangannya dan akan

dilaksanakan kapan,” tanya Novita.

Tak hanya itu, Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini juga mendesak Kementerian PUPR memperhatikan Waduk Matenggeng yang berada di wilayah Wanareja-Cilacap bagian barat. Serta, usulannya mengenai *fly-over* di wilayah Rawalo dan wilayah depan Pasar Kroya-Kabupaten Cilacap.

“Kemudian, juga Kabupaten Cilacap ini beberapa waktu lalu air lautnya naik. Jadi, banyak sekali tanggul-tanggul jebol. Maka, saya usulkan agar Kementerian PUPR segera membangun tanggul-tanggul di pinggir laut wilayah Cilacap,” usul legislator dapil Jawa Tengah VIII tersebut. ■ pun/es



Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti (kanan). Foto: Runi/MAN



# BUMN Jangan Selewengkan Anggaran Program PEN



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung (kedua dari kanan). Foto: Azka/MAN

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta agar tidak ada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memanfaatkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memperbaiki kesalahan salah urus perusahaannya. Menurutnya hal tersebut sama saja berarti melakukan penyelewengan.

Hal tersebut ia nyatakan dalam rapat Komisi VI DPR RI dengan para Direktur Utama (Dirut) BUMN yang digelar secara terbuka di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (22/6). Martin mengaku sudah berulang kali menjelaskan, dirinya telah memberikan tiga klasifikasi negara perlu memberi suntikan modal kepada BUMN.

“Pertama, karena ada BUMN yang diberikan tugas khusus oleh negara, sehingga membutuhkan dana. Lalu karena ada ekspansi atau investasi, seperti contoh ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation). Yang perlu

didalami adalah kalau BUMN perlu uang negara karena kesalahan manajemen atau inefisiensi. Ini yang menurut saya hingga saat ini belum ada penjelasan dari Menteri dan BUMN terkait ini,” jelas politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Martin kemudian menyinggung bahwa menurutnya ada segelintir perusahaan BUMN yang telah mengalami kesalahan manajemen, dan ingin memanfaatkan peluang mendapatkan anggaran program PEN tersebut. Ia pun meminta BUMN tersebut untuk hati-hari, karena Komisi VI DPR RI telah mengantongi daftar BUMN-BUMN yang bermasalah sejak sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

“Karena banyak kesalahan-kesalahan manajemen di BUMN ini, yang sekarang kemudian karena Covid itu lalu dikait-kaitkan ada dampak dengan Covid. Padahal kita tahu terang benderang bahwa sebelum Covid-19 pun BUMN-BUMN ada yang sudah bermasalah. Saya punya daftarnya di sini. Jadi menurut saya ya terserah saja,

bahwa ini perintah Perppu atau apa, tetapi saya bilang jangan main-main,” pesan Martin kepada BUMN.

Martin secara tegas mengatakan bahwa sudah jadi tugas Parlemen untuk melakukan fungsi pengawasan ketat terhadap penggunaan dana program PEN untuk BUMN ini. Sebab menurutnya kesalahan manajemen korporasi di BUMN merupakan satu hal yang tidak layak untuk diperjuangkan oleh DPR RI dan Pemerintah, karena secara keuangan pun mereka (BUMN) sudah merugikan negara.

“Jika kesalahan korporasi, saya rasa kan kita harus bisa memberikan penekanan atau sorotan terhadap kesalahan-kesalahan seperti ini. Tadi ada teman-teman juga mempersoalkan terkait payung hukumnya dana talangan. Sudah payung hukumnya tidak jelas, kita pun tidak tahu bagaimana negara ini bisa selamat kalau kesalahan manajemennya ini tidak diperbaiki,” tukas legislator dapil Sumatera Utara II itu. ■ *er/sf*

# Komisi VII Kecewa ESDM Hapus Program untuk Rakyat Kecil



Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris. Foto: Azka/MAN

**K**omisi VII DPR RI prihatin dan kecewa banyaknya program yang menasar masyarakat kecil seperti petani dan nelayan yang dihapus oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dimana hal tersebut tertuang dalam kebijakan *refocusing* anggaran Tahun 2020 sebagai dampak pandemi virus Corona (Covid-19).

Dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (23/6), Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mengingatkan kembali berbagai kesepakatan dalam rapat sebelumnya terkait program Kementerian ESDM yang telah didiskusikan bersama

dengan Komisi VII DPR RI hingga berjam-jam. Terutama yang terkait program bagi rakyat kecil.

“Hal ini semata untuk mengingatkan Pak Menteri bahwa kesepakatan tersebut menjadi perjuangan yang kami janjikan kepada masyarakat. Tapi kemudian Bapak menghapus seluruh program untuk rakyat secara sepihak. Apa Bapak pernah dipermalukan di depan masyarakat banyak? Terus terang dengan menghapus secara sepihak program-program untuk rakyat itu, artinya sama dengan Bapak memermalukan kami, DPR, di depan masyarakat luas, terutama konstituen kami,” ungkap Andi Yuliani.

Politisi Fraksi PAN ini menyebutkan

sebelumnya Menteri ESDM dan Komisi VII DPR RI sepakat membangun Jaringan Gas (Jargas) sebanyak 266.070 Sambungan Rumah (SR). Namun yang lebih memprihatinkan lagi, ada tiga program di ESDM untuk masyarakat kecil yang dihapuskan dalam *refocusing* anggaran tahun 2020 ini.

Program tersebut meliputi Konverter Kit (Konkit) untuk nelayan yang awalnya disepakati akan dibagikan sebanyak 40 ribu paket, Konkit untuk petani yang awalnya disepakati akan dibagikan ke Petani sebanyak 10 ribu paket, serta konversi minyak tanah ke Elpiji 3 kg yang awalnya akan dibagikan sebanyak 526.616 paket. Semua itu setelah mengalami *refocusing* anggaran, ditiadakan alias dihapus secara sepihak oleh Menteri ESDM.

“Yang saya herankan mengapa anggaran program untuk rakyat kecil yang dihapus dan mengalami pemotongan. Sementara anggaran belanja barang meliputi perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja non operasional lainnya hanya mengalami penurunan sekitar 10 persen saja,” tukas Andi Yuliani.

Politisi dapil Sulawesi Selatan II ini meminta agar semua itu di-*breakdown*. Karena Komisi VII DPR RI perlu mengetahui anggaran tersebut digunakan untuk apa saja. “Tolong jangan diganggu atau dihilangkan program untuk rakyat kecil. Ini tanggung jawab kita yang juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan Pak Menteri sebagai pembantu Presiden harusnya ikut membantu merealisasikan janji-janji Presiden untuk menyejahterakan rakyat, bukan malah sebaliknya,” tegas Andi Yuliani. ■ ayu/es



# Selly Andriany Dukung Keberadaan Program Pusat Logistik BNPB

**A**nggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendukung adanya program anggaran untuk memperkuat proses yang akan dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Seperti, pusat logistik regional, pusat kesiap-siagaan penanggulangan bencana dan pusat komando krisis darurat bencana. Selly sangat mengapresiasi jika pusat-pusat logistik itu bisa sesegera mungkin dilaksanakan. Menurut Selly, pusat-pusat logistik tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dan rawan bencana.

“Kita membutuhkan pusat-pusat logistik, seperti yang terjadi kemarin akibat pandemi Covid-19, kemudian

tsunami maupun gempa bumi. Kita merasakan sulitnya kita untuk melakukan penyampaian logistik ke daerah,” ujar Selly dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB Doni Monardo beserta jajaran, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).

Namun demikian, politisi PDI-Perjuangan ini mengingatkan apabila program pusat-pusat logistik itu berjalan maka ke depannya yang harus dipersiapkan oleh BNPB adalah terkait dengan *bufferstock* logistik yang harus dipergunakan di masing-masing daerah. Karena, setiap daerah memiliki karakteristik kerawanan bencana yang berbeda-beda. Termasuk, demografi masyarakat yang sangat berbeda. Maka, ia

mengusulkan pusat-pusat logistik harus dipenuhi dengan kebutuhan logistik yang berbeda-beda pula.

Lebih lanjut, Selly meminta BNPB belajar dari kasus pandemi Covid-19 dimana terjadi kegagalan saat berbicara logistik di luar kebutuhan pangan. Selly mengungkapkan, pada saat terjadi bencana non-alam seperti seolah terjadi kegagalan pada saat berbicara mengenai logistik Alat Pelindung Diri (APD) dan masker. “Maka, ini pun yang harus menjadi catatan oleh BNPB bahwa logistik yang dimaksud di sini bukan hanya logistik keperluan pangan saja. Tetapi, juga logistik yang menyangkut dengan non-alam,” tandas Selly.

Di sisi lain, terkait dengan dukungan manajemen sebesar Rp 238 miliar, legislator dapil Jawa Barat VIII itu meminta program tersebut diperkuat BNPB, karena adanya tambahan untuk pagu inspektorat dan unit kerja. Jika memungkinkan, tuturnya, ia meminta kepada BNPB agar ada dukungan manajemen variabel sumber daya manusia dan tata kelola hubungan antar kelembagaan BNPB dengan BPBD.

“Sebab posisi BPBD di daerah juga tak kalah mulia terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini mereka harus bekerja hampir 24 jam dan bahkan tidak pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi, memang masih banyak dibutuhkan SDM yang tanggap dan kompeten yang memang siap menangani masalah kebencanaan. Ini menjadi catatan saya bahwa dalam dukungan manajemen ini bukan hanya untuk d BNPB tetapi bagaimana BPBD di daerah pun bisa dimaksimalkan,” tegas mantan Wakil Bupati Cirebon itu. ■ pun/sf



Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. Foto: Oji/MAN

# Jangan Kesampingkan Pencegahan *Stunting* di Masa Pandemi

**A**nggota Komisi IX DPR RI Intan Fitriana Fauzi meminta Pemerintah agar tidak mengesampingkan program perlindungan anak Indonesia dari *stunting* di masa pandemi Covid-19. Untuk itu, alokasi dana untuk percepatan pencegahan *stunting* sebagai program prioritas nasional tidak boleh direalokasi dengan alasan apapun.

“Kebijakan merealokasi anggaran *stunting*, bisa beresiko timbulnya *lost generation* (generasi hilang) dalam jangka panjang,” ujar Intan dalam berita rilisnya kepada *Parlementaria*, Senin (22/6). Menurutnya, persoalan *stunting* ini tidak boleh dinomorduakan. Sebab berpotensi mengancam produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, karena rentan diserang berbagai penyakit gagal tumbuh yang berpengaruh kepada kemampuan kognitif.

Selain itu, jelasnya, *stunting* berdampak buruk pada daya saing bangsa. Praktis, kerugian ekonomi yang harus ditanggung akibat beban *stunting* juga signifikan dan berpengaruh kepada Produk Domestik Bruto (PDB). “Capaian pendidikan yang rendah dan pendapatan yang rendah akan berdampak pada tingginya angka kemiskinan,” urainya.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan Tahun 2019, sebelum pandemi mencatat sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta balita di Indonesia mengalami *stunting*. Angka *stunting* Indonesia berada di urutan keempat dunia. Prevalensi balita *stunting* di Indonesia pada 2019 yakni 27,7 persen. Jumlah yang masih jauh dari nilai standar WHO yang seharusnya di bawah 20 persen.



Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fitriana Fauzi. Foto: Jaka/MAN

Di masa pandemi ini, lanjut Intan, program nasional penurunan *stunting* dan penanggulangan gizi buruk tidak mencapai target. Hal ini sebagai dampak *refocusing* anggaran Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya dana untuk penanganan *stunting*. Kondisi ini juga membuat target penurunan angka *stunting* sebesar 14 persen pada tahun 2024 akan sulit tercapai.

“Yang jelas, Komisi IX DPR RI sudah menyetujui percepatan penanganan *stunting* diperluas ke 260 kabupaten/kota di Tahun 2020 dari yang sebelumnya 160 kabupaten/kota pada tahun 2019. Ini wujud nyata dukungan politik DPR terhadap Pemerintah,” jelas politisi Fraksi PAN ini.

Intan mengakui, perhatian Pemerintah dalam mengatasi *stunting* sudah memadai. Hal ini tertuang dalam Perpres tentang Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Di samping itu, juga Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan

Gizi yang dianjurkan bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini, alokasi anggaran untuk penanganan Kesehatan Tahun 2020 sebesar Rp 132,2 triliun, naik dari alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 123,1 triliun. Namun anggaran tersebut tidak hanya dikelola oleh Kemenkes tapi juga K/L bidang kesehatan lainnya termasuk transfer ke daerah. “Kami di Komisi IX DPR RI telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 360 miliar untuk penguatan intervensi paket gizi, serta alokasi dana transfer daerah untuk penanganan *stunting* sebesar Rp 92,5 miliar,” terangnya.

Lebih lanjut, Intan menerangkan DPR RI mendukung upaya Pemerintah untuk penanganan *stunting* yang melibatkan multi sektoral. “Hal ini dibarengi dengan peningkatan kemampuan akses masyarakat terhadap bahan pangan terutama bagi masyarakat miskin harus diprioritaskan oleh Pemerintah agar penyelesaian kasus *stunting* di Indonesia segera terjadi,” pungkasnya. ■ dep/es



# Pelaku Ekraf Harus Diperhatikan Kesejahteraannya

**A**nggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menegaskan, para pelaku ekonomi kreatif (ekraf) harus betul-betul diperhatikan kesejahteraannya. Dalam *roadmap* membangkitkan kembali sektor pariwisata setelah lama terpuruk karena wabah Corona (Covid-19), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum menyentuh pembahasan bagaimana mensejahterakan para pelaku ekraf dan keluarganya.

Penghasilan para pelaku ekraf terutama yang berada di objek-objek wisata jatuh ke titik nadir. “Pak Menteri harus memberi atensi para pelaku ekraf juga pelaku pariwisata, karena penghasilan mereka saat ini 0,” ungkap Putra saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menparekraf Wishnutama Kusubandio yang

”

**PARA PELAKU EKRAF DAN PARIWISATA ADALAH UJUNG TOMBAK YANG IKUT MEMBERI PEMASUKAN BAGI NEGARA. KETIKA MEREKA TERPURUK, EKONOMI NEGARA JUGA SEDIKIT BANYAK IKUT TERPURUK**

digelar secara virtual dan kehadiran fisik di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).

Perhatian itu harus dilihat sampai ke keluarganya. Putra mengingatkan, para pelaku ekraf dan pariwisata adalah ujung tombak yang ikut memberi pemasukan bagi negara. Ketika mereka terpuruk, ekonomi negara juga sedikit banyak ikut terpuruk. “Mereka sumber pemasukan negara. Kita harus memanusiasi mereka,” seru Putra.

Sekali lagi politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menambahkan, sebelum membangun sektor pariwisata yang sempat terpuruk, kesejahteraan para pelaku ekraf dan keluarganya di sentra-sentra destinasi wisata harus diperhatikan dulu. “Perlu ada laporan tambahan dari Kemenparekraf soal memanusiasi pelaku ekraf tersebut,” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I itu. ■ mh/sf



Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan. Foto: Jaka/MAN

# Komisi XI Terima Pagu Indikatif Bappenas, BPS, dan LKPP

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif sejumlah mitra kerja, diantaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebesar Rp 1,509 triliun, pagu indikatif Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp 5,278 triliun, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar Rp 192,6 miliar.



**KOMISI XI DPR RI  
MENDUKUNG USULAN  
DANA TAMBAHAN  
ANGGARAN PAGU  
INDIKATIF LKPP  
TAHUN 2021 UNTUK  
MEWUJUDKAN  
TRANSFORMASI  
PENGADAAN BARANG  
DAN JASA**

“Besaran pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas tersebut ditujukan untuk program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp 760,4 miliar dan dukungan manajemen sebesar Rp 749,1 miliar. Berdasarkan sumber dana pagu indikatif tersebut terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 1,380 triliun, pinjaman sebesar Rp 82,430 miliar, dan dana hibah sebesar Rp 46,590 miliar,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Berikutnya, besaran pagu indikatif Badan Pusat Statistik (BPS) secara rinci untuk program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) senilai Rp 2,281 triliun dan dukungan manajemen senilai Rp 2,996 triliun. Sedangkan berdasarkan sumber dananya, berasal dari rupiah murni sebesar Rp 5,255 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 23,4 miliar.

Sementara, pagu indikatif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2021 diperuntukkan bagi pengadaan barang dan jasa nasional senilai Rp 82,5 miliar dan dukungan manajemen senilai Rp 110,1 miliar. Anggaran tersebut secara keseluruhan bersumber dari rupiah murni, tanpa adanya sumber lain.

“Komisi XI DPR RI mendukung usulan dana tambahan anggaran pagu indikatif LKPP Tahun 2021 untuk mewujudkan transformasi pengadaan barang dan jasa. Terkait BPS, Komisi XI merekomendasikan peninjauan ulang sesuai kebutuhan mengenai rencana pemotongan anggaran Sensus Penduduk 2020,” pungkas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menutup kesimpulan. ■ alw/sf

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI  
Fathan Subchi. Foto: Arief/MAN





# Desy Ratnasari Jabarkan Draf RUU Praktik Psikologi



Anggota Badan Legislasi DPR RI Desy Ratnasari. Foto: Jaka/MAN

**A**nggota Badan Legislasi DPR RI Desy Ratnasari sebagai pengusul Rancangan Undang-Undang (RUU) Praktik Psikologi menekankan bahwa organisasi profesi psikologi yang diatur dalam RUU tersebut akan berusaha merangkul beragam permasalahan di masyarakat. Baik itu masalah kesehatan klinis, masalah psikologi sosial dan beragam persoalan dalam ruang lingkup ilmu psikologi.

Adapun, organisasi profesi psikologi dalam RUU tersebut adalah himpunan psikologi Indonesia yang selanjutnya disebut Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) sebagai

wadah berhimpun para tenaga psikologi yang berbentuk badan hukum. “Kami ingin memberikan layanan praktik psikologi ini lebih luas lagi dalam berbagai aspek kehidupan,” papar Desy saat rapat Panja RUU Praktik Psikologi di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

Oleh sebab itu, berkenaan dengan organisasi profesi yang dimaksud dalam draf RUU Praktik Psikologi, sebagai pengusul Desy mengusulkan organisasi profesi psikologi masuk dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

“Sesungguhnya, kami ingin menjadi sebuah organisasi yang merangkul beragam permasalahan di masyarakat. Jadi, tidak terfokus di Kementerian Kesehatan saja yang hanya menangani masalah klinis misalnya. Dan tidak pula hanya permasalahan yang menyangkut di Kementerian Sosial yang berkenaan dengan psikologi sosial. Kami berpikir, yang lebih netral adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” papar Desy.

Saat rapat, Desy juga menjabarkan tentang praktik psikologi yang harus diselenggarakan berdasarkan asa perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, non diskriminasi, dan keadilan. Selain itu, setiap psikolog dan psikolog praktik dengan keahlian khusus yang menjalankan praktik psikologi harus memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Untuk mendapat SIPP, psikolog dan psikolog praktik dengan keahlian khusus harus memiliki rekomendasi dari organisasi profesi dan surat pernyataan memiliki tempat praktik psikologi atau surat keterangan dari pimpinan tempat praktik psikologi.

Di samping itu, dalam pasal 43, ayat 1, huruf (a) diatur bahwa psikolog asing harus menguasai Bahasa Indonesia dengan baik dan benar yang dibuktikan dengan hasil perolehan nilai tes Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Psikolog asing juga diharuskan memiliki pemahaman budaya Indonesia. Yakni, memahami sikap dan perilaku masyarakat Indonesia sesuai dengan karakteristik budayanya. Namun, tidak terbatas memahami sistem hukum yang berlaku di Indonesia. ■ eko/es

# Banggar Tetapkan Sementara Asumsi Dasar RAPBN 2021

**A**sumsi dasar untuk RAPBN 2021 mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Kecuali Indonesia Crude Price (ICP) dan *lifting* minyak, semua indikator asumsi dasar ekonomi makro sudah diusulkan Banggar. Berikutnya, tinggal meminta pandangan Pemerintah. Semua asumsi masih ada kemungkinan mengalami perubahan, seiring pendalaman yang sedang dilakukan Banggar dan Pemerintah.

Ketua Banggar Said Abdullah memimpin langsung rapat ini di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6). Sudah ada keputusan sementara Banggar, sebelum Pemerintah sendiri memberi masukan atas asumsi dasar tersebut. "Saya bacakan keputusan asumsi dasar dan nanti kita minta masukan juga dari pemerintah. Kecuali ICP dan *lifting*, kita beri kesempatan Komisi VII DPR menyelesaikannya," kata Said.



**SEMUA INDIKATOR ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO SUDAH DIUSULKAN BANGGAR. TINGGAL MEMINTA PANDANGAN PEMERINTAH. SEMUA ASUMSI MASIH ADA KEMUNGKINAN MENGALAMI PERUBAHAN, SEIRING PENDALAMAN YANG SEDANG DILAKUKAN BANGGAR DAN PEMERINTAH**

Asumsi Dasar Ekonomi Makro terdiri dari pertumbuhan ekonomi ditargetkan 4,5-5,5, inflasi 2,0 persen-4,0 persen, nilai tukar rupiah Rp 13.700-14.900 per dollar AS, dan suku bunga SBN 6,29 persen-8,29 persen. Pada klaster target pembangunan juga diusulkan, tingkat pengangguran terbuka pada 7,7 persen-9,1 persen, tingkat kemiskinan 9,2 persen-9,7 persen, gini rasio 0,377-0,379, dan indeks pembangunan manusia (IPM) 72,78-72,95.

"Ada sedikit catatan dari F-PDI Perjuangan soal ini. Tingkat suku bunga SBN tenor 10 tahun berada pada kisaran 6,67-7,29 persen, tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 7,7 persen-8,5 persen, tingkat kemiskinan pada kisaran 8,9 persen-9,2 persen, dan gini rasio berada pada kisaran 0,371-0,377," ungkap Said. ■ mh/sf

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Foto: Naifurroj/MAN





# Pemulihan Ekonomi 2020, Kunci Pembangunan 2021

**A**nggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Siti Mukaromah menyatakan pembangunan nasional tahun 2021 mendatang sangat bergantung pada beberapa indikator. Indikator pertama adalah bagaimana penanganan pandemi virus Corona (Covid-19), dan yang kedua adalah pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 merupakan tantangan multisektor. Baik itu sektor pembangunan manusia dan kebudayaan, sektor perekonomian, hingga sektor kemaritiman investasi, dan keamanan.

Secara khusus, terkait pertumbuhan ekonomi nasional, menurut Siti adalah bagaimana tercipta pemulihan sektor produksi dan peningkatan daya beli masyarakat. Pemaparan tersebut disampaikan Siti dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menkopolkum Mahfud MD, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menkomarives Luhut Binsar Pandjaitan dan Seskemenko PMK Y.B. Satya Sananugraha yang diselenggarakan secara virtual dan fisik di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

“Pembangunan nasional tahun 2021 akan sangat bergantung pada beberapa hal. Terutama bagaimana tercipta adanya pemulihan sektor produksi dan peningkatan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat pada tahun 2020 ini betul-betul sangat menurun. Dan perlu diperhatikan permodalan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan tentunya bagaimana UMKM dan pengusaha besar bisa menjadi saling terjalin kebersamaan. Sehingga, bisa mengurangi impor bahan baku



Anggota Banggar DPR RI Siti Mukaromah. Foto: Andri/MAN

industri,” ujar politisi F-PKB ini.

Di sisi lain, Siti mengharapkan perhatian terhadap UMKM dari Pemerintah itu butuh tindakan konkret. Dimana, tutur Siti, sektor perekonomian di tengah pandemi Covid-19 saat-saat ini merupakan sektor yang berada dalam posisi terdampak yang sangat luar biasa. Maka, Siti menyatakan, ia mendorong adanya strategi dan sinergitas lintas kemitraan dalam rangka mendorong pemerataan ekonomi bagi masyarakat kecil, khususnya UMKM.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI ini juga menyoroti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkualitas merupakan tantangan tersendiri dalam sistem pendidikan dan kesehatan yang mampu beradaptasi di tengah pandemi.

Menurut Siti, ada semacam *gap* dalam fasilitas pendidikan, dalam hal ini antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta. Untuk itu, Siti mendesak Pemerintah memberikan adanya solusi yang saat ini kerap terjadi di tengah masyarakat tersebut.

“Termasuk, juga tentang bagaimana pendidikan pesantren kita butuh perhatian khusus dari Pemerintah. Terlebih, dalam situasi *new normal*, mereka membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah secara langsung. Jadi, saya tentunya memberi masukan dan berharap mengingar pendidikan pesantren adalah bagian dari salah satu generasi masa depan dimana negara harus memberikan kesempatan yang sama,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VIII itu. ■ pun/sf

# BKSAP Apresiasi Bantuan Penanggulangan Covid-19 dari Uni Eropa

**B**adan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melalui Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–Uni Eropa Andreas Eddy Susetyo menyampaikan apresiasi atas bantuan Uni Eropa senilai 350 juta Euro, atau sekitar Rp 6,33 triliun untuk membantu negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam pertempuran melawan pandemi virus Corona (Covid-19) saat ini.

Andreas menyebutkan, bantuan tersebut diberikan untuk mendukung upaya mengatasi krisis kesehatan, memperkuat sistem kesehatan, serta mengurangi dampak ekonomi dan sosial kawasan. “Kemitraan dan solidaritas Indonesia-Uni Eropa, khususnya ASEAN-Uni Eropa sangat penting demi kemajuan yang lebih lanjut,” kata Andreas saat menerima Duta Besar Uni Eropa untuk Republik Indonesia, Vincent Picket di Ruang Tamu Pimpinan, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Terkait kerja sama, Andreas menuturkan, Indonesia-Uni Eropa telah membangun hubungan di berbagai bidang dalam beberapa tahun ini dan telah dijabarkan dalam Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama Uni Eropa-Indonesia (PCA). Namun, kata Anggota Komisi I DPR RI ini, diperlukan upaya yang erat dan terpadu dari semua pemangku kepentingan termasuk keterlibatan penuh Parlemen Indonesia-Uni Eropa.

Menurut Andreas, terpenting saat ini adalah mentransformasikan komitmen itu menjadi kenyataan. Terdapat beberapa sektor yang bisa dikembangkan, yakni perdagangan

dan investasi. “Sebagai Ketua GKSB Indonesia-Uni Eropa, saya sangat mengharapkan kerja sama dan koordinasi yang erat dari anda untuk memastikan misi kami membantu kepentingan Indonesia-Uni Eropa di berbagai sektor,” harapnya.

Lebih lanjut, Andreas menuturkan tak sedikit proyek-proyek yang didanai UE untuk mendukung infrastruktur hijau di Indonesia. Diantaranya, prakarsa kota pintar yang tahan iklim, proyek untuk perlindungan lahan gambut dan mitigasi kabut asap, keanekaragaman hayati laut serta dukungan untuk prakarsa Segitiga Terumbu Karang.

Sementara itu, terkait sengketa minyak kelapa sawit atau *Crude Palm*

*Oil* (CPO) yang berlangsung antara Indonesia-Uni Eropa, Andreas berharap dapat mencapai penyelesaian dengan cara damai, tanpa mengobarkan perang dagang. Sisi lain, jumlah penduduk Indonesia yang bergantung kepada industri sawit tidak sedikit.

“Mewakili rakyat Indonesia, kita sepakat untuk menjembatani isu CPO ini melalui *parliament to parliament*, Karena, mereka mengatakan sebetulnya tidak ada larangan. Tetapi, mereka *concern* terhadap masalah lingkungan hidup. Nanti, kita duduk bersama bagaimana kelapa sawit dikembangkan dan di lingkungan tetap terjaga, itu yang perlu kita bicarakan,” tandas politisi PDI-Perjuangan itu. ■ *ann/sf*



Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–Uni Eropa Andreas Eddy Susetyo saat menerima Duta Besar Uni Eropa untuk Republik Indonesia, Vincent Picket. Foto: Rumi/MAN





Ketua Timwas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI Muhaimin Iskandar memimpin kunjungan kerja ke Kementerian Sosial. Foto: Ojji/MAN

# Timwas DPR Minta Kemensos Terus Perbaiki Data Bansos

**T**im Pengawas (Timwas) Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI secara resmi menggelar kunjungan kerja ke Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Jakarta, baru-baru ini. Pada kunjungan ini, Timwas DPR RI dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.

Usai pertemuan dengan Menteri Sosial Juliari P. Batubara beserta jajaran, Ketua Timwas DPR RI itu di hadapan awak media menyatakan Kemensos bersama jajaran Pemerintah Daerah harus terus menerus melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos). “Kami

berharap, Kemensos beserta Pemda terus menerus melakukan apa yang disebut data baru dari perkembangan yang ada,” ujar Muhaimin.

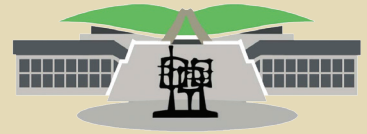
Lebih lanjut, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Korkesra) tersebut menegaskan perbaikan data penerima bansos penting untuk dilakukan agar bansos yang disalurkan tepat sasaran. Sehingga, ungkap Muhaimin, ke depannya diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih penerima bantuan bansos di seluruh Tanah Air.

“Data masih menjadi persoalan utama dalam penyaluran bansos terhadap masyarakat terdampak Covid-19. Untuk itu, ke depannya saya

mengharapkan tidak ada lagi warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial dalam penyaluran bansos,” tegas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu saat pertemuan.

Kunjungan Timwas DPR RI ke Kemensos tersebut dalam rangka mengetahui perkembangan penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak Covid-19. Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut beberapa Anggota DPR RI yang tergabung dalam Timwas DPR antara lain Diah Pitaloka, (F-PDIP), Dewi Asmara (F-Golkar), Sodik Mudjahid (F-Gerindra), dan Sungkono (F-PAN). Sementara Mensos RI Juliari P. Batubara didampingi jajaran pejabat Eselon I Kemensos. ■ pun/sf





Wakil Ketua DPR RI Korpolkam M. Azis Syamsuddin mengesahkan Pimpinan Panitia Khusus RUU tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6). Foto: Andri/MAN



Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel memimpin pergantian Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Gus Irawan Pasaribu kepada Ramson Siagian, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Senin (22/6). Foto: Rifqi/MAN



Bagian Pelayanan Kesehatan (Yankes) dan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI membagikan Alat Pelindung Diri (APD) kepada pedagang Pujasera di Kompleks Parlemen, guna mencegah penyebaran virus Covid-19, Rabu (17/6). Foto: Arief/Man

